

Inisiatif Lokal dalam Pengembangan Pariwisata dan Perlindungan Kelestarian Hutan Kalibiru Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo DIY

V.L. Sinta Herindrasti^{1,*}, Endro Winarno², Gunawan Prawiro³

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia

²Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas (PR KSDK) Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

³Senior Bahagia.org, Bantul

* valentina.herindrasti@uki.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini ingin menggambarkan inisiatif masyarakat lokal Kali Biru, di wilayah Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dalam melakukan afirmasi ke arah peningkatan kesejahteraan sosial mereka melalui upaya pendayagunaan potensi hutan sebagai sumber mata pencaharian utama, tanpa mengesampingkan pemenuhan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Pendayagunaan potensi yang dilakukan antara lain melalui pengembangan kelompok tani, pembelajaran usaha pariwisata, pengembangan berbagai unit usaha menggunakan tata kelola manajemen profesional dan komersial, telah menyumbang bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan yang secara nasional, regional dan global digaungkan khususnya dalam bentuk desa wisata lestari. Melalui suatu perjuangan dan dinamika yang luar biasa masyarakat Kalibiru mampu menemukan dan mempertahankan jati diri dalam relasinya dengan alam dan menemukan suatu formulasi pembangunan pariwisata berkelanjutan masyarakat Asia Pasifik dalam bentuk filosofi lokal: pelestarian hutan, penciptaan lapangan kerja dan pasar. Studi menemukan bahwa inisiatif dari para pionir Kalibiru melalui usaha pencarian terus menerus telah menemukan jalan bagi terbentuknya suatu model pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui sinergi dengan aktor eksternal yang berfungsi sebagai pendamping melalui lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah melalui beragam pelayanan sektoralnya serta dukungan masyarakat lokal melalui komunitas petani dan kelompok usaha lokal. Berbagai aktor tersebut merupakan pendorong dan pengembang inisiatif skala kecil menuju implementasi yang lebih besar.

Kata kunci: Inisiatif Lokal, Hutan Lestari, Pariwisata Berkelanjutan, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

This study wants to describe the initiative of the local community of Kali Biru, in the Hargowilis Kapanewon Kokap Subdistrict area, Kulon Progo, Special Region of Yogyakarta Indonesia in affirming the direction of increasing their social welfare through efforts to utilize the potential of the forest as the main source of livelihood, without compromising the fulfillment of the principles forest sustainability. Utilization of the potential that is carried out, among others, through the development of farmer groups, tourism business learning, the development of various business units using professional and commercial management governance, has contributed to the achievement of sustainable development which is echoed nationally, regionally and globally, especially in the form of sustainable tourism villages. Through an extraordinary struggle and dynamics the Kalibiru people were able to find and maintain their identity in relation to nature and find a formulation of sustainable tourism development for the Asia Pacific community in the form of a local philosophy: forest conservation, job creation and markets. The study found that initiatives from Kalibiru pioneers through continuous search efforts have found a way for the formation of a sustainable community welfare development model through synergies with external actors that function as companions through non-governmental organizations, local governments through their various sectoral services and local community support through farming communities and local business groups. These various actors are the drivers and developers of small-scale initiatives towards larger implementations.

Keywords: Local Initiatives, Sustainable Forests, Sustainable Tourism, Community Welfare.

1. PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo mempromosikan objek wisata alam Kalibiru yang terletak di wilayah Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap sebagai harmonisasi antara hijaunya hutan di hamparan bukit yang sangat luas dengan pemandangan indah. Objek wisata alam Kalibiru berjarak 35 Km dari pusat Kota Yogyakarta terletak di Perbukitan Menoreh berada pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut (mdpl). Objek wisata alam Kalibiru mengandalkan pemandangan alam sebagai daya tarik utama wisatawan dengan menyediakan Menara Pandang dan Gardu Pandang berbentuk Rumah Pohon. Fasilitas lain yang ditawarkan oleh objek wisata alam ini adalah sejumlah spot untuk berfoto dan wahana outbond, diantaranya tracking, flying fox, dan sejumlah wahana permainan lainnya. Objek wisata alam Kalibiru juga menyediakan fasilitas pendukung, seperti cottage atau homestay untuk 10-15 orang, sejumlah penjual makanan, sejumlah warung mirip kafe, aula joglo untuk pertemuan yang berkapasitas 50-100 orang, toilet, mushola, free wifi area, perkantoran dan mobil operasional.

Muasal objek wisata alam Kalibiru ini adalah sebuah hutan negara. Warga setempat bersama kelompok masyarakat mempunyai ide bisnis pariwisata, yakni mencoba "menjual" indahnya view dengan tajuk wisata alam. Semangat gotong-royong untuk mewujudkan mimpi besar tumbuh tanpa mengenal waktu yang diawali dengan gerakan swadaya masyarakat setempat untuk membuat akses jalan, sejumlah Gardu Pandang dan pondok wisata tanpa mengesampingkan upaya pelestarian hutan. Di samping wisata liburan (pleasure), objek wisata alam Kalibiru juga berfungsi sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat berupa pengembangan ilmu tentang kehutanan dan pelestariannya. Pengelolaan objek wisata alam ini sepenuhnya ditangani oleh warga masyarakat setempat melalui pelibatan tokoh masyarakat, generasi muda dan warga masyarakat lain yang peduli dengan kondisi lingkungan. Budaya lokal sangat kental mewarnai perjalanan pengelolaan objek wisata alam ini, baik dari segi pertanian, peternakan maupun budaya berupa berbagai atraksi kesenian. Masyarakat setempat dikenal sangat ramah dan santun, sehingga tidak mengherankan apabila para pengunjung

merasa sangat nyaman bersosialisasi dengan warga sekitar.

Perpaduan antara keindahan alam dengan budaya lokal inilah pada akhirnya membentuk sebuah destinasi wisata yang dari waktu ke waktu semakin menarik kedatangan banyak wisatawan dari berbagai penjuru, bahkan mampu menginspirasi lahirnya Kalibiru-Kalibiru lain di sejumlah wilayah di tanah air. Namun mewabahnya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama hampir dua tahun tidak dapat dihindari sangat mengganggu warga masyarakat dalam mewujudkan mimpi mereka yang hampir menjadi kenyataan. Pandemi Covid-19 berdampak sangat besar bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Strategi pengendalian Pandemi Covid-19, yakni Pembatasan Sosial telah berdampak luas pada perekonomian global, terutama bagi industri pariwisata sebagai sektor yang mengalami dampak negatif paling besar, tidak terkecuali pada upaya masyarakat dalam pengembangan objek wisata alam Kalibiru.

Wabah Pandemi Covid-19 ternyata bukan satu-satunya permasalahan yang harus dihadapi warga masyarakat Kalibiru dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial mereka melalui upaya pendayagunaan potensi hutan sebagai sumber mata pencaharian utama. Melalui kajian ini dideskripsikan bagaimana inisiatif warga masyarakat Kalibiru dalam melakukan afirmasi ke arah peningkatan kesejahteraan sosial mereka melalui upaya pendayagunaan potensi hutan sebagai sumber mata pencaharian utama, tanpa mengesampingkan pemenuhan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Secara lebih spesifik kajian ini mendeskripsikan kondisi geografis Kalibiru, berupa topografi, fasilitas jalan atau konektivitas dengan dunia luar, mata pencaharian, sumber pangan, pendidikan dan adat istiadat warga setempat.

Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana pendayagunaan potensi hutan sebagai sumber mata pencaharian utama warga setempat melalui pengembangan kelompok tani, pembelajaran usaha pariwisata, pengembangan berbagai unit usaha menggunakan tata kelola manajemen profesional dan komersial, hingga semuanya ini menjadi sumber konflik antara warga setempat dengan pihak pemerintah lokal. Bagaimana inisiatif warga setempat dalam

mendapatkan solusi terkait konsesi pendayagunaan hutan untuk bernegosiasi dengan pemerintah lokal. Bagaimana dampak transformasi manajemen hutan, usaha pariwisata, peningkatan produksi pertanian dan manajemen usaha, termasuk pengolahan empon-empon bagi pendapatan warga serta penyerapan tenaga kerja setempat. Kajian ini juga mendeskripsikan bagaimana visi konservasi dan prinsip pengolahan hutan lestari mengubah masyarakat Kalibiru menjadi masyarakat yang berdaya dan berdaulat akan sumber ekonomi-sosial-budaya untuk kemajuan bersama. Kajian ini diakhiri dengan tinjauan bagaimana best practice lokal ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik. Manajemen hutan berkelanjutan Kalibiru telah diakui baik secara nasional dan regional khususnya dari aspek sosial ekonomi, budaya dan lingkungan.

Dasar Pemikiran

Pengembangan industri wisata dan pengelolaan hutan ibarat sekeping mata uang yang harus berjalan beriringan dan berkelanjutan sesuai dengan Agenda Pembangunan 2016-2030 (Sustainable Development Goals/SDGs). Tuntutan global ini telah terangkum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Republik Indonesia, 2021). Dalam Pasal 2 ayat (1) digariskan bahwa ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan antara lain meliputi: a. pengelolaan berkelanjutan; b. keberlanjutan sosial dan ekonomi; c. keberlanjutan budaya; dan d. keberlanjutan lingkungan. Sedang wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Republik Indonesia, 2009).

Terkait dengan kebijakan optimalisasi pengelolaan hutan, pemerintah telah memberikan ruang (hutan lindung) sebagai lokasi wisata. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Republik Indonesia, 2021). Dari aspek ekonomi, hutan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di kawasan hutan lindung, masyarakat diberi peluang berusaha untuk memenuhi kesejahteraannya dalam bentuk Jasa Lingkungan. Pasal 130 (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung antara lain meliputi: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. pemulihan lingkungan; dan f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon (Republik Indonesia, 2021).

Kebijakan tentang pengembangan industri wisata dan pengelolaan hutan di atas merupakan upaya inklusif yang melibatkan masyarakat di sekitar hutan. Keuntungan dari pelibatan masyarakat antara lain: 1) bagi masyarakat hutan lindung merupakan potensi besar dan masyarakat dapat memperoleh nilai tambah dari jasa lingkungan; 2) bagi pemerintah, partisipasi masyarakat meringankan beban dalam menjaga hutan (maintenance). Kebijakan tersebut dapat menstimuli tumbuhnya inisiatif masyarakat untuk mengembangkan fungsi Hutan Lindung sebagai Wisata alam.

Secara harfiah, inisiatif adalah bentuk kesadaran diri dari individu (respon) yang berpikir dan harus melakukan sesuatu terhadap objek yang menjadi fokus perhatiannya, baik untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sendiri maupun kebutuhan umum. Manifestasi inisiatif bisa terstimuli oleh ide/gagasan, atau tindakan. Menurut Rawling (2016), Initiative is the ability to be resourceful and work without always being told what to do. It requires resilience and determination. Personal initiative (PI) uses an active approach that is characterized by its self-starting and proactive nature and by overcoming difficulties that arise in the pursuit of a goal. Self-starting implies that the goals are not given or assigned by someone else, but that the person himself or herself develops these goals (Fay D and Frese, M., 2001). Pandangan Crant (2000) dalam Belschak (2010) dan Taylor (2013) yang dikutip Asih (2017) mengungkapkan bahwa inisiatif merupakan sikap proaktif yang

menentang status quo bukan hanya pasif menerima kondisi yang ada. Taylor (2013) memaknai inisiatif merupakan sebuah respon spontan yang diberikan individu tanpa menunggu instruksi dari atasan dan organisasi (Taylor, 2013).

Secara implisit uraian di atas menunjukkan bahwa inisiatif merupakan tindakan (respon) untuk mengatasi persoalan. Inisiatif berbanding lurus dengan kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, dan keberanian mengambil risiko. Inisiatif dapat dilihat dari tindakan yang paling sederhana, seperti spontanitas individu/kelompok menutup lubang di jalan agar tidak menimbulkan kecelakaan (sebab-akibat). Inisiatif yang lebih luas akan lebih menekankan terjadinya perubahan. Pandangan Crant menyiratkan bahwa ide/inovasi menjadi bagian penting untuk perubahan. Inisiatif dapat muncul atas ketidakpuasan terhadap kondisi kesejahteraan dan upaya termasuk hasil yang diperoleh untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Menurut pandangan Crant, inisiatif (perubahan) akan mengalami banyak benturan, terutama dengan kelompok anti perubahan yang selama ini telah merasa nyaman dan menikmati kondisi diri dan lingkungan selama ini.

Telaahan tentang inisiatif akan menjadi lebih menarik, manakala inisiatif individu/kelompok akan dapat menginisiasi terjadinya sebuah gerakan penyadaran bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Inisiatif individu/kelompok tersebut dapat dilegitimasi; melembaga di tengah masyarakat dan menjadi spirit masyarakat untuk aktivitasnya. Jika inisiatif ini berjalan secara alami, maka proses terlembaganya inisiatif individu/kelompok kecil akan memerlukan proses dan waktu yang lebih panjang. Terlebih lagi, apabila inisiatif tersebut berkaitan dengan inovasi pemanfaatan lingkungan sumberdaya yang ada di sekitarnya (dari agraris ke industri).

Dalam kerangka pembangunan masyarakat partisipatif, inisiatif masyarakat ditempatkan sebagai salah satu faktor penting. Namun tidak datang begitu saja. Inisiatif masyarakat umumnya diawali dari inisiatif individu yang suka berpikir, banyak ide dan mampu memprakarsai untuk bertindak, baik untuk diri maupun lingkungannya. Inisiatif juga bisa muncul dalam diskusi pada kelompok kecil dalam suatu komunitas. Peer

Net (2018) mengungkapkan, community development ranges from small initiatives within a small group to large initiatives that involve the broader community (Ibrahim A.H; Ibrahim M.M.A. 2019). Proses untuk pencapaian tujuan (dari inisiatif individu menjadi inisiatif kelompok kecil dan seterusnya menjadi inisiatif masyarakat lokal) cukup panjang, bahkan inisiatif individu yang sudah berkembang menjadi inisiatif kelompok dapat kandas di tengah jalan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pencapaian tujuan inisiatif kelompok adalah kurangnya dukungan masyarakat dan otoritas lokal. Dalam konteks ini dukungan dapat berupa stimulan untuk tumbuh-berkembangnya inisiatif hingga pengimplementasiannya.

Secara harafiah, stimulan dapat diterjemahkan sebagai suatu rangsangan dan/atau dorongan untuk berpikir dan bertindak, baik bagi individu maupun kelompok. Secara prinsip ada dua bentuk stimulan, yakni orang dan bukan orang. Stimulus dalam bentuk orang dapat dikelompokkan dalam 1) individu (misalnya konsultan, tokoh masyarakat dan lain lain) dan 2) kelompok (baik homogen maupun heterogen). Stimulan dalam bentuk bukan orang merupakan produk kultural yang dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni: 1) materi (barang, uang, jalan, bangunan dan lain lain; serta 2) non materi (adat istiadat, ajaran agama, aturan perundangan dan termasuk kebijakan dan program) (Sarwono, 2002). Perubahan sosial dapat terjadi karena munculnya social movement. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) walaupun kecil, termasuk gerakan sosial. Sejumlah LSM di luar negeri telah dapat menimbulkan perubahan sosial. Yayasan juga dapat berfungsi sebagai organisasi bagi perubahan sosial (Rakhmat, 1999).

2. METODE PENELITIAN

Tim peneliti mengunjungi dan mengumpulkan data di lapangan khususnya selama bulan Juni-Juli 2022 meskipun selama periode 2019 Kalibiru telah menjadi bagian dari studi Penyiapan Masyarakat dalam Menghadapi Era Aerotropolis dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ketika tim peneliti juga terlibat.

Tim melaksanakan wawancara intensif dengan para inisiator utama Kalibiru dan para penduduk lokal (baik generasi tua dan muda) yang terlibat dalam kegiatan bisnis sehari-hari wisata alam Kalibiru.

Studi ini bertujuan untuk memahami kondisi seoptimal mungkin dan menggambarkan masyarakat Kalibiru dalam mengembangkan pariwisata dan perlindungan hutan. Lebih jauh studi ini mengeksplorasi pemahaman subyektif berbagai pengalaman hidup yang beragam dan kompleks dari sumber data untuk dinegosiasikan secara sosial dengan konteks budaya dan sejarah Kalibiru. Salah satu metode penelitian yang mampu menopang pencapaian tujuan kajian ini adalah Metode Kualitatif Interpretif versi Creswell (2016). Menurut Creswell, kualitatif merupakan salah satu metode untuk mengeksplorasi, memahami dan mendeskripsikan fenomena yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif melibatkan serangkaian upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur pengumpulan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Secara umum metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan metode kualitatif, karena metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dipahami.

Lokasi kajian ini adalah kawasan wisata alam Kalibiru Desa Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dibutuhkan kajian ini adalah individual's life history atau human document dari sejumlah informan yakni tokoh warga masyarakat setempat pemrakarsa objek wisata alam Kalibiru. Metode deskriptif kualitatif menitikberatkan pada observasi dan

suasana alamiah (natural setting). Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas sumber data. Pengalaman dan strategi lapangan berperan secara simultan dalam memadukan penggunaan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, partisipasi dan studi dokumentasi dalam upaya pengumpulan data penelitian (Creswell, 2016). Analisis data menggunakan teknik Kualitatif Interpretif berupa penggalian makna subyektif mengenai pengalaman hidup yang variatif dan kompleks dari sumber data untuk dinegosiasikan secara sosial dengan setting kultural dan historis setempat. Penelitian kualitatif melibatkan proses yang cukup kompleks terarah untuk mengeksplorasi dan menceritakan pengalaman seseorang yang terlibat dalam sebuah kejadian. Oleh sebab itu diperlukan sebuah teknik analisis spesifik guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan Hutan sebagai Sumber Utama Mata Pencaharian Warga

Sebelum tahun 1930, sebagian besar hutan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, termasuk Kalibiru merupakan perkampungan penduduk yang telah dihuni secara turun-temurun. Pada zaman penjajahan Belanda, hutan di kawasan Pegunungan Menoreh ini pernah digunakan sebagai tempat persembunyian Pangeran Diponegoro ketika melawan tentara milik Persatuan Perusahaan Hindia Timur (Vereenigde Oostindische Compagnie yang disingkat VOC). Kendati bermukim di kawasan hutan, penduduk setempat bekerja sebagai petani tradisional yang menggarap lahan pertanian dengan luas sangat terbatas. Pada tahun 1930 hingga 1945 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa sebagian perkampungan tersebut ditutup karena akan dijadikan kawasan hutan penghasil kayu. Penduduk yang bermukim di kawasan tersebut dipaksa keluar tanpa diberi kompensasi yang layak.

Pada tahun 1945 hingga 1949 penguasaan atas kawasan hutan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan menetapkannya sebagai Hutan Negara. Secara keseluruhan Hutan Negara di wilayah

Kabupaten Kulon Progo seluas 1.047 Ha, sebagian besar berada di sepanjang pegunungan Menoreh. Pada tahun 1949 hingga 1964, pemerintah berhasil melakukan reboisasi sehingga kawasan ini mampu berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menjadi daerah tangkapan air yang sangat baik. Mata air mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama, sehingga pemukiman di sekitar kawasan ini tidak pernah mengalami kekeringan. Keawetan tanah lebih terjaga dan tanah longsor hampir tidak pernah terjadi, bencana banjir dapat dicegah, dan keanekaragaman hayati, baik berupa tanaman maupun satwa juga terjaga dengan baik. Masyarakat merasa nyaman tinggal di kawasan ini karena kebutuhan hidup dapat terpenuhi dari lahan pertanian mereka.

Pada tahun 1964 hingga 2000 kondisi Hutan Negara mulai mengalami kerusakan akibat pengrusakan hutan berupa pencurian kayu oleh rakyat setempat karena desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi ketika situasi politik Indonesia sedang kacau dilanda pemberontakan PKI. Puncak dari kerusakan hutan terjadi pada saat melandanya krisis global di tahun 1997-2000. Pada periode itu kontrol pemerintah terhadap pendayagunaan sumberdaya hutan sedang sangat lemah, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pembalakan liar (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kalibiru>). Fakta ini juga terjadi di kawasan Pedusunan Kalibiru Hargowilis Kokap Kulon Progo. Warga setempat, khususnya Kamijan (60 tahun), Parjan (65 tahun), Sukidal (60 tahun), Sudadi (56 tahun), Nasir (47 tahun) dan Parlan (almarhum) merasa kecewa karena tidak dapat lagi memanen kayu seperti waktu-waktu sebelumnya setelah hutan di lingkungan tempat tinggal mereka dinyatakan sebagai Hutan Lindung.

Pada saat itu, penduduk Kalurahan Hargowilis, khususnya warga dusun Kalibiru adalah masyarakat agraris di sekitar kawasan Hutan Negara. Secara turun temurun, masyarakat memiliki ketergantungan pada sumberdaya alam di sekitarnya. Mereka adalah petani subsisten, melakukan budidaya tanaman dan ternak sebatas untuk konsumsi keluarga (tidak dijual). Tanaman produktif masyarakat, antara lain Cengkeh, Vanili, Mlinjo, Kelapa, Sengon, Pete, dan Empon-empon. Ternak yang dipelihara, antara lain Ayam, Kambing, dan

Sapi. Masyarakat menjual hasil kebun hanya untuk kebutuhan tertentu, seperti untuk membiayai pendidikan anak, karena masyarakat telah menyadari bahwa pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan di hari esok.

Seiring dengan semakin besarnya tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga, masyarakat mulai menjual kayu dari pepohonan di ladangnya, bahkan acapkali mereka menebang pohon yang berada di Hutan Negara (menjarah hutan). Penjarahan hutan tersebut merupakan inisiatif murni dari warga masyarakat karena yang menanam pohon adalah leluhurnya. Hampir seluruh masyarakat di dusun Kalibiru mempunyai pengalaman menjarah di Hutan Negara. Menurut Kamijan (mantan Kepala Dukuh Kalibiru), penjarahan tidak dilakukan sendiri melainkan secara berkelompok. Penjarahan dilakukan untuk biaya pendidikan anak (mulai SMP) dan biaya hidup anak yang harus kost di Wates, karena saat itu, bahkan hingga sekarang Kalurahan Hargowilis hanya memiliki sekolah tingkat dasar.

Penjarahan kayu di Hutan Negara terus berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Salah satu faktor maraknya penjarahan hutan adalah pengawasan dari pemerintah yang sangat minim. Menurut kepala pengelola objek wisata alam Kalibiru (Sudadi), pengawasan dari pemerintah oleh Penjaga Hutan kurang ketat. Di kawasan hutan lain, oknum Penjaga Hutan atau Mandor Hutan yang mestinya bertugas mengamankan hutan, justru bertindak sebaliknya. Tidak jarang mereka bahkan terlibat dalam pembalakan hutan tersebut. Pada sisi lain, warga masyarakat selalu bahu-membahu untuk saling melindungi meningkatkan komunikasi perihal keberadaan Penjaga Hutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sumber persoalan masyarakat warga Dusun Kalibiru adalah kemiskinan. Persoalan ini tentunya tidak hanya berdiri sendiri tetapi berimbas pada persoalan yang lain, seperti kesehatan dan pendidikan. Bagi warga masyarakat Kalibiru, saat itu penjarahan hutan adalah salah satu cara yang paling cepat untuk mengatasi desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ikhwal ini berlangsung terus-menerus hingga kondisi hutan yang semula lebat dan bagus, dari waktu ke waktu proses penggundulan hutan terus berlangsung secara masif dan tanaman hutan semakin berkurang.

Secara ekologis kerusakan hutan ini membawa dampak negatif yang sangat besar dan meluas. Kekeringan sering terjadi pada musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan sering terjadi musibah banjir dan tanah longsor. Semakin banyak warga masyarakat yang mengalami kegagalan dalam usaha pertanian. Memuncaknya pembalakan hutan yang terjadi antara tahun 1997 hingga 2000 telah membuat beberapa warga yang peduli terhadap hutan merasa prihatin. Hal ini juga menjadi alasan bagi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni Yayasan Damar untuk masuk ke wilayah masyarakat di sekitar Hutan Negara tersebut. Kehadiran LSM ini di tengah masyarakat sempat menimbulkan kecurigaan, namun setelah masyarakat paham akan maksud dan tujuannya, perlahan-lahan mereka bisa menerima keberadaan LSM ini. Hal ini didukung oleh cara pendekatan yang dinilai dapat menjembatani permasalahan yang sedang dihadapi berkaitan dengan kondisi Hutan Negara. Pada pertengahan tahun 2000 dimulailah pendampingan secara intensif oleh Yayasan Damar terhadap masyarakat "penjarah" Hutan Negara yang tergabung dalam 7 kelompok tani di 3 desa di 2 wilayah kecamatan. Proses pendampingan berjalan cukup intensif, baik berupa pertemuan warga, diskusi, berbagai bentuk pelatihan, studi banding maupun kegiatan partisipatif lainnya.

Kegiatan pendampingan ini secara perlahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan. Masyarakat mulai melakukan sejumlah pembenahan melalui penyusunan rencana kegiatan yang bertujuan ke arah pelestarian hutan berupa 3 aspek pengelolaan hutan, yakni pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan dan pengelolaan usaha. Besamaan dengan upaya tersebut, atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No 677/Kpts-II/1998 yang kemudian berganti menjadi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 31 Tahun 2000, tentang Hutan Kemasyarakatan, ke-7 kelompok tani secara resmi mengajukan izin kepada pemerintah perihal pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2003 warga masyarakat setempat mendapatkan izin sementara pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dari Bupati Kulon Progo untuk jangka waktu selama 5 tahun. Kawasan hutan yang mulai

gersang ditanami dengan tanaman semusim untuk memenuhi kebutuhan pangan warga masyarakat. Kawasan hutan pun berubah fungsi menjadi lahan pertanian. Jangka waktu izin sementara selama 5 tahun merupakan waktu untuk melakukan ujicoba terhadap Kelompok Tani HKm dalam mengelola Hutan Negara. Pada akhir berlakunya izin tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menilai apakah Kelompok Tani HKm berhak mendapatkan izin tetap (definitif) dengan jangka waktu yang lebih lama. Pada tahun 2007 terbit Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang ditujukan kepada tujuh koperasi atau Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) di Kabupaten Kulon Progo. Lima koperasi atau KTHKm memperoleh status Hutan Lindung, yakni Sido Akur (20,6 Ha), Mengger Rejo (12,1 Ha), dan Mandiri (29,7 Ha) dari Kalurahan Hargowilis Kokap, serta Rukun Makaryo (35,8 Ha) dan Suko Makmur (15,8 Ha) dari Sendangsari Pengasih, sedangkan dua koperasi/KTHKm memperoleh status Hutan Produksi, yakni Taruna Tani (43,2 Ha) dan Nuju Makmur (39,6 Ha) keduanya dari Hargorejo Kokap (BKPH Yogyakarta, n.d.).

Status hutan di Kalibiru dinyatakan sebagai Hutan Lindung, artinya masyarakat tidak dapat memetik hasil jerih payah selama menanam dan memelihara tanaman keras di hutan tersebut. Salah satu dampaknya adalah perencanaan keluarga menjadi berantakan. Warga masyarakat menumpahkan kekesalan pada lima orang yang telah menginisiasi penanaman kayu di hutan tersebut. Mereka sangat marah setelah mengetahui ternyata izin yang turun adalah untuk Hutan Lindung. Apa yang telah mereka lakukan selama ini, yakni menanam dan merawat kayu ternyata sia-sia. Terbayang bagaimana sulitnya warga masyarakat menjaga hutan agar aman dari gangguan. Pengalaman yang diungkap Nasir (47 tahun), bahwa warga masyarakat enggan diajak dialog oleh lima orang pengurus KTHKm karena merasa dibohongi. Akhirnya Parjan (65 tahun) sebagai ketua KTHKm setempat meminta Dinas Perhutanan dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo untuk menjelaskan lebih jauh kepada warga masyarakat Kalibiru perihal Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang ditujukan kepada tujuh koperasi atau

Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo.

Lima koperasi atau KTHKm yang memperoleh status Hutan Lindung tetap bersemangat untuk melestarikan hutan, dengan harapan mereka akan mendapat manfaat dari kelestarian hutan tersebut. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah melalui Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan, kelima KTHKm membuat perubahan pola tanam kawasan hutan, dari yang semula dominan tanaman penghasil kayu, dirubah dengan memperbanyak tanaman serbaguna dan buah-buahan. Hal ini dimaksudkan agar petani bisa memanfaatkan hasil buah tanaman tersebut, karena di kawasan Hutan Lindung tidak ada lagi sistem bagi hasil panen kayu di masa yang akan datang. Dalam kerangka pelestarian hutan berbasis masyarakat, warga masyarakat sangat memahami kondisi dan berhubungan langsung dengan hutan. Ada seperangkat nilai yang telah dikonstruksi sepanjang masyarakat itu ada (secara turun temurun). Artinya masyarakat telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan hutan lestari.

Kamijan (60 tahun) sebagai salah satu pengurus KTHKm mengungkapkan bahwa untuk menghibur diri, setiap hari mereka hanya duduk-duduk dan memandang hasil jerih payah yang tidak bisa mereka panen. Hingga suatu saat mereka kedatangan orang asing yang bernama Chris Bennett (Christopher Patrick Alexandra Bennett). Beliau telah menginspirasi kelima orang perintis keberadaan objek wisata alam wisata Kalibiru. Sudadi (56 tahun) menunjuk batu hitam dan mengisahkan bahwa batu itu diberi nama Batu Chris Bennett, di sinilah awal sejarah keberadaan objek wisata alam Kalibiru. Batu hitam berdiameter sekitar satu meter berada di sebelah kanan setelah pintu masuk objek wisata alam Kalibiru. Pernyataan ini didukung Kamijan bahwa pada saat Chris Bennett duduk di batu dan menunjuk batu tersebut sambil mengatakan kepada mereka, "ini kalau digali ada uangnya". Di kalangan warga masyarakat, pernyataan Bennett tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan penafsiran yang paling sederhana dari masyarakat adalah apakah di bawah batu itu ada emas?.

Setelah Bennett meninggalkan Kalibiru, pernyataannya senantiasa menjadi topik bahasan di kalangan lima orang pengurus

KTHKm tersebut. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu hingga dari bulan ke bulan lima orang pengurus tersebut selalu berusaha untuk memahami makna di sebalik pernyataan Bennett. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu di lokasi batu hitam untuk berbincang dan pulang tanpa hasil, sementara mereka harus menghidupi keluarga. "Kami dulu seperti orang gila. Berangkat dari rumah pamit dengan orang rumah mau cari rumput atau kayu. Tapi kami saling bertemu dan ngobrol kesana kemari memimpikan bagaimana caranya agar hutan ini dapat menghasilkan dan terselamatkan. Kadang sampai malam, sampai rumah tidak bawa apa-apa", demikian ujar Parjan (65 tahun). Saat itulah mereka mulai menghadapi konflik dalam keluarga. Sudadi (56 tahun) menuturkan: "kami malu dengan istri dan kalau masuk rumah tidak berani lewat pintu depan. Saat itu kami dianggap seperti orang gila. Pengalaman Sudadi ini juga dialami oleh kelima orang karibnya.

Sejak terbitnya Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Damar di lapangan mulai berkurang intesitasnya. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri bagi masyarakat. Namun berkat komitmen yang begitu kuat dari para pengurus KTHKm yang terus dimotivasi dan didampingi oleh beberapa mantan pegiat Yayasan Damar dalam membangun hutan, hal itu segera dapat diatasi. Kerisauan tentang pernyataan Bennett mulai menemui titik terang ketika lima orang pengurus tersebut bertemu dengan Moko (mantan pegiat LSM Damar) yang sudah dikenal warga masyarakat dan sangat mengenal wilayah setempat. Mereka berdiskusi hingga terbetik pikiran untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai objek wisata. Saat itu warga masyarakat masih meragukan, apa mungkin orang akan berkunjung di objek wisata yang terisolir dan tidak mempunyai akses jalan. Mereka sepakat untuk membentuk sebuah wadah yang diharapkan dapat menggantikan peran pendamping. Wadah ini diberi nama Komunitas Lingkar (Komunitas Peduli Lingkungan Alam Lestari) dengan kepengurusan terdiri dari perwakilan pengurus 7 KTHKm dan warga masyarakat yang merasa terpanggil untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan, khususnya hutan. Pengurus

Komunitas Lingkar secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas isu-isu terkait pengelolaan HKm yang hasil pembahasannya kemudian ditindaklanjuti di tingkat KTHKm.

Masyarakat lokal mempunyai komitmen kuat dalam pelestarian lingkungan, meski pada awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan subsisten keluarga. Namun seiring dengan tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin besar, terjadi pergeseran nilai dalam pemanfaatan hutan. Kondisi ini tercermin dari visi pengurus KTHKm, yakni pelestarian hutan, menciptakan lapangan kerja, dan Pasar. Visi tentang pelestarian hutan merupakan pengejawantahan dari nilai spiritual masyarakat Jawa hamemayu hayuning bawana yang telah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Secara harafiah nilai tersebut diterjemahkan memelihara dan memperbaiki lingkungan fisik (alam) dunia. Dalam konteks pemeliharaan hutan di Kalibiru dimaknai bahwa manusia dan hutan mempunyai kebutuhan yang dapat saling mengisi. Lapangan kerja diterjemahkan dalam pengelolaan objek wisata, sedangkan makna pasar adalah warung di kawasan objek wisata. Visi pengurus KTHKm ini memberi gambaran keberadaan upaya untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan, baik untuk lingkungan maupun ekonomi; bahkan sebelum target SDGs 2030 ditetapkan.

Jalan semakin mendekati mimpi dengan kenyataan ketika tujuh kelompok tani HKm di Kulon Progo yang tergabung dalam Komunitas Lingkar membuat acara Sedekah Bumi di Kalibiru di puncak bukit yang kini menjadi objek wisata alam Kalibiru. Untuk merintis terwujudnya objek wisata tersebut, Moko bersedia mendampingi Komunitas Lingkar untuk bertemu dengan beberapa lembaga yang mempunyai komitmen dalam pengembangan wisata. Usaha mereka semakin kuat ketika mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata Yogyakarta beserta sejumlah pejabat lainnya. Di hadapan Bupati Kulon Progo (waktu itu) Toyo Santoso Dipo disampaikanlah serangkaian rencana pengembangan objek wisata alam di Kalibiru. Bupati meminta komunitas untuk membuat proposal. Akhirnya mereka dijanjikan akan mendapat bantuan sebesar Rp 445 juta yang berasal dari anggaran community development. Pergerakan pencapaian tujuan atas inisiatif masyarakat perlu dukungan dari luar (stimulan), baik secara individu maupun

kelembagaan. Dalam hal ini kelompok tani tidak berjalan sendiri untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa tujuan perubahan tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendampingan juga dibutuhkan terutama ketika berhadapan dengan pemerintah.

Sikap proaktif yang ditunjukkan oleh kelompok tani untuk keluar dari persoalan seringkali berhadapan dengan penguasa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk setiap perubahan diperlukan tokoh yang mempunyai komitmen kuat untuk pencapaian tujuannya. Crant menyebut sebagai tindakan menentang statusquo bukan hanya pasif menerima kondisi yang ada. Ikhwal ini mengisyaratkan bahwa ada aturan yang sudah dipahami dan disetujui oleh masyarakat (anggota komunitas) tetapi ada kehendak perlunya penghargaan terhadap keberadaan masyarakat lokal. Hal inilah yang membedakan program-program berbasis masyarakat atas nama pemberdayaan dari pemerintah pusat dengan seperangkat indikator, pendamping, mekanisme yang dijalankan secara periodik. Dipilihnya Kalibiru karena sudah mempunyai fasilitas dengan view yang sangat bagus. Pada bulan Desember 2008 dana bantuan pun turun. "Tidak ada konsultan perencanaan, tidak ada konsultan pengawas. Murni swakelola", terang Parjan. Pembangunan objek wisata alam diawali dengan menggerakkan KTHKm untuk memperlebar jalan setapak menjadi jalan besar menuju Kalibiru. Pelebaran jalan yang dilanjutkan dengan penataan lingkungan di sekitar hutan lindung dilakukan secara gotongroyong setiap hari minggu. Sedangkan dana bantuan digunakan untuk membuat pondok sebanyak enam buah, WC sebanyak tiga unit, gardu pandang sebanyak empat unit, bak penampungan air sebanyak dua unit, dan satu unit permainan flying fox sepanjang 86 meter.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, inisiatif masyarakat yang terjadi di Kalibiru merupakan manifestasi dari tuntutan arus bawah (bottom up) bermula dari kelompok kecil yang menginisiasi konsep pembangunan masyarakat (snowball). Proses ini sejalan dengan pemikiran Peer Net BC (2018) bahwa community development ranges from small initiatives within a small group to large initiatives that involve the broader

community (dalam Ibrahim A.H; Ibrahim M.M.A. 2019). Bagi pemerintah, keberhasilan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Kalibiru merupakan dukungan kuat atas kebijakan dan program pelestarian hutan berbasis masyarakat. Pembangunan objek wisata alam Kalibiru adalah salah satu kegiatan yang dikembangkan oleh Komunitas Lingkar sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat pengelola Hutan Lindung di Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan objek wisata alam Kalibiru diyakini mampu menjadi kegiatan alternatif bagi masyarakat agar kelestarian hutan tetap terjaga. Pada sisi lain, secara ekonomi masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Atas dasar perkembangan yang cukup bagus ini, maka objek wisata alam Kalibiru akan menjadi lebih menarik ketika semua potensi yang tersedia, baik potensi alam maupun potensi kultur/budaya masyarakat dipadukan menjadi sebuah harmonisasi yang serasi dan layak untuk dikunjungi.

Objek wisata alam Kalibiru dibangun tahun 2008, dan mulai beroperasi pertengahan 2009. Pada tahun pertamanya kunjungan sekitar lima ribu orang, tahun berikutnya meningkat tujuh ribu orang. Tahun 2010 mulai ada yang pengunjung yang berkemah di objek wisata alam tersebut. Sampai suatu ketika terlihat banyak pengunjung yang selfie di pohon tempat berhentinya flying fox. Rupanya mereka suka selfie dengan latar belakang panorama Waduk Sermo dan perbukitan Menoreh yang menghijau. Di sebelah selatan terlihat samar pantai laut selatan. Pengelola akhirnya membuat tempat selfie khusus. Bersamaan dengan itu, foto-foto indah wisata Kalibiru viral di media sosial. Kepopuleran Kalibiru tak terbendung lagi, puncaknya pada tahun 2016, dengan jumlah pengunjung tercatat hampir 450 ribu orang dalam setahun. Membludaknya pengunjung memaksa pengelola untuk memperbaiki pelayanan, menambah sarana, dan jumlah tenaga pengelola. Tidak kurang 120 orang terlibat menjadi tenaga tetap dan lepas. Kebanyakan berasal dari Kalurahan Hargowilis, bahkan dari luar Kapanewon Kokap. Tenaga yang bekerja di objek wisata alam Kalibiru minimal mendapat upah sesuai UMR Kulon Progo masih dapat tambahan uang lembur dan

Tunjangan Hari Raya. Karenanya beberapa pekerja memilih bekerja di Kalibiru dan meninggalkan pekerjaan lamanya di kota-kota besar. Pada tahun 2016 objek wisata alam Kalibiru mendapatkan pemasukan sebesar Rp 5,9 Milyar. Sebuah angka fantastis yang bahkan para perintisnya sendiri tidak menyangka. Kebanyakan pengelolanya adalah para petani yang awam, dan tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan tentang pariwisata.

Objek wisata alam Kalibiru kini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan dari sejumlah negara di dunia. Keindahan alam yang masih asri menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tidak mengherankan apabila objek wisata alam Kalibiru menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Keberhasilan pengembangan objek wisata alam ini, tentu saja tidak terlepas dari peran warga di sekitarnya. Semakin banyak warga masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya kepada keberadaan objek wisata alam Kalibiru. Mereka menerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung dari perhutanan sosial. Mulai dari pemilik warung, operator, sopir jeep, tour leader, hingga pengatur jalan. "Jika dulu berkebun, sekarang sebagian mereka memilih jadi pengojek atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan wisata", ujar Parjan.

Perubahan signifikan telah dirasakan warga di sekitar objek wisata alam Kalibiru. Rumah warga yang dahulu reot, kini telah dibangun permanen. Apabila dulu pergi ke Wates harus berjalan kaki, kini banyak warga yang sanggup membeli mobil. Jalan beraspal yang dapat dilalui kendaraan roda 4 berukuran sedang telah terbangun hingga ke titik tertinggi di Kalibiru. "Seluruh Indonesia sudah banyak yang belajar kemari. Saya juga diundang keliling Indonesia menjadi pembicara, kecuali Papua. Saya ceritakan kesuksesan perhutanan sosial Kalibiru", kata Parjan. Menurut Sudadi (56 tahun): "Para pekerja yang ada di Kalibiru adalah murni warga sekitar. Ada 250 personel yang terlibat di objek wisata alam Kalibiru. Hampir 75 persen warga terserap tenaganya di sektor wisata ini. Sekitar 76 orang karyawan dengan status sudah tetap, tercatat juga adanya 30 orang karyawan freelance. Mereka dibayar

dengan upah minimum pekerja, yakni sekitar Rp 1,8 juta hingga Rp 2 juta per bulan”.

Tingkat Pendidikan karyawan beraneka ragam, ada yang memang hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Namun banyak pula lulusan S1 yang kembali ke kampung halaman untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya. Khusus hari libur atau libur panjang, personel bisa bertambah hingga mencapai 1.500 orang. Hal ini dilakukan agar para wisatawan dapat terlayani dengan baik. Sebab, para karyawan tidak hanya bekerja di dalam area wisata, namun ada pula yang bekerja di jalanan menuju tempat wisata tersebut. Dari hasil yang didapatkan, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perawatan dan pembangunan di area wisata. Sudadi menjelaskan hasil keuntungan dari tiket masuk obyek wisata ini juga digunakan untuk program sosial. ”Kami punya program bedah rumah untuk warga sekitar. Pada tahun 2017 sudah lima rumah kami bedah dengan nominal Rp 15 juta untuk setiap rumahnya. Saat ini yang menjadi pekerjaan terberat adalah meningkatkan kualitas pelayanan agar orang tetap berminat datang ke Kalibiru. Ada ratusan orang yang harus digaji. Jika pemasukan per bulan kurang dari Rp 300 Juta, maka sulit bagi kami” demikian tutup Sudadi.

Inisiatif Lokal Sebagai Kekuatan Pengubah

Inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup acapkali berhadapan dengan kebiasaan yang sudah berjalan sangat lama (business as usual). Bahkan menurut Crant sikap proaktif dianggap menentang statusquo. Dalam konteks inisiatif lokal di kalangan warga masyarakat Kalibiru, perintis keberadaan objek wisata alam Kalibiru adalah lima orang yang mempunyai ikatan kuat (solid) dan konsisten untuk melakukan perubahan di lingkungannya dengan mentaati aturan yang berlaku, meski dalam perjuangan meraih sukses mereka harus berhadapan dengan persoalan keluarga, masyarakat hingga konflik kepentingan dengan pemerintah.

Sebagai ilustrasi terkait konflik kepentingan dengan pemerintah, Kamijan (saat itu sebagai Kepala dukuh) dan Sudadi (Ketua Pengelola objek Wisata Alam Kalibiru) menceritakan sejumlah pengalaman ketika berhadapan dengan Pemerintah Daerah. Persoalan yang dibincang adalah selama

pengelolaan objek Wisata Alam Kalibiru belum pernah berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sudadi mengemukakan: ”Kami ini mengelola lahan pemerintah pusat dengan pemberi ijin adalah Departemen Kehutanan RI. Di samping itu belum ada aturan dari pemerintah daerah untuk setor PAD. Kami tidak berani karena khawatir itu menyalahi aturan (gratifikasi)”. Secara lebih rinci, Kamijan mengungkapkan pertemuan dengan pemerintah daerah, baik dengan Kepala Dinas Pariwisata maupun Bupati. ”Kami telah dipanggil delapan kali oleh Bu Niken Probo Laras (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo) yang mempertanyakan mengapa objek wisata Kalibiru tidak ada retribusi untuk PAD melalui Dinas Pariwisata. Kami juga pernah dipanggil Pak Toyo Santoso Dipo (Bupati Kulon Progo 2006-2011) sebanyak 11 kali. Intinya untuk menandatangani peraturan daerah tentang pemasukan pendapatan Kulon Progo, tapi kami tidak mau tandatangan. Kami masih berpegang pada aturan dari pemberi ijin pengelolaan hutan lindung yaitu Kementerian Kehutanan RI (pusat)”. Persoalan tentang PAD dari objek Wisata Alam Kalibiru hingga kini belum selesai. Oleh karena itu, pemungutan retribusi dilakukan di luar areal hutan lindung yang dijadikan objek Wisata Alam Kalibiru. Pemungutan retribusi dilakukan melalui pos retribusi di jalan menuju Kalibiru.

Telaahan tentang keberhasilan perjuangan masyarakat mendayagunakan Hutan Lindung menjadi objek wisata alam, sebenarnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dukungan pemerintah tersebut, antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana wisata, pelatihan kepada masyarakat untuk pemandu wisata di desa dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kehutanan Kabupaten Kulon Progo selalu memantau kegiatan wisata alam di areal Hutan Lindung dan daya dukung lingkungannya. Penyediaan air oleh PDAM Kulon Progo secara khusus untuk kawasan objek Wisata Alam Kalibiru. Penerangan (listrik) dalam kawasan objek Wisata Alam Kalibiru serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pengaspalan jalan menuju Kalibiru. Dalam pengembangan wisata Daerah Istimewa Yogyakarta, objek wisata alam Kalibiru telah dimasukkan dalam Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2032 pada pasal 17 ayat (16) bahwa strategi pengembangan kawasan Pegunungan Menoreh dan sekitarnya dilakukan dengan cara pengembangan a. Waduk Sermo sebagai area wisata air, wisata luar ruangan dan olahraga; serta b. Kalibiru sebagai kawasan Desa Wisata.

4. KESIMPULAN

Selama kurang lebih 2 tahun, lima orang perintis keberadaan objek wisata alam Kalibiru telah berhasil mentransformasi masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, khususnya wisata. Transformasi dipicu kekecewaan atas penetapan status Hutan Lindung tahun 2007 oleh pemerintah hingga pembukaan objek wisata alam Kalibiru untuk umum pada tahun 2009. Masyarakat setempat merintis dari nol (tanpa asset) hanya berbekal semangat gotongroyong untuk bekerja. Gotongroyong pada dasarnya merupakan salah satu media masyarakat untuk menjalin kerja sama dan wahana aktualisasi modal sosial (Gunawan, 2014). Capaian hasil yang selama ini telah diperoleh objek wisata alam Kalibiru antara lain:

1. Penyediaan wahana wisata pilihan, seperti 1) Menara Pandang dan Gardu Pandang berbentuk Rumah Pohon, 2) *Flying Fox* dan *High Rope*, yakni permainan tantangan di ketinggian seperti Gantole, sepeda di atas awan dan lain-lainnya, 3) *Tracking* atau pendakian dan *Outbond*. Di kawasan ini terdapat 9 *spot* foto dengan latar belakang keindahan alam dan panorama Waduk Sermo dan hutan rimbun.
2. Penyediaan fasilitas area parkir, mushola, toilet, pendopo/joglo, pondok wisata, tempat makan, hingga perpustakaan, perkantoran dan dua unit mobil operasional.
3. Jumlah pengunjung dari mancanegara mencapai 45 persen. Pada hari libur panjang seperti Lebaran, antrean mobil mengular hingga 2 km.
4. Penyediaan 80 personil untuk mengelola objek wisata. Namun

seiring dengan mewabahnya pandemi *Covid-19* hanya 40 personil yang tetap bekerja.

Keberhasilan objek wisata alam Kalibiru telah memberikan kontribusi besar pada warga masyarakat sekitar dan menstimuli tumbuhnya objek-objek wisata baru, baik di kawasan Kalurahan Hargowilis, seperti Pule Payung dan Canthing Mas maupun di kawasan lain, seperti Wisata Alam Kalibiru di Polewali Mandar Sulawesi, Wisata Alam Kalibiru di Papua, dan Wisata Alam Kalibiru di Malang. Keberhasilan pengelolaan kelestarian hutan dan pariwisata di kawasan Kalibiru telah menginisiasi beberapa wilayah bukan hutan (pertanian) untuk dijadikan sebagai kawasan desa wisata. Eforia masyarakat tersebut hanya berdasar dari pengamatan terhadap Kalibiru yang sukses meningkatkan peredaran uang di wilayahnya tanpa melihat potensi yang dimiliki desa tersebut.

Keberhasilan pengelolaan objek wisata alam Kalibiru mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain

1. Bennet telah mengunjungi Kalibiru sebanyak delapan kali, Pada kunjungan terakhir Bennet sangat terharu dan tidak menyangka perkembangannya sangat cepat. Hutan Kalibiru telah rimbun kembali.
2. Perintis objek wisata alam Kalibiru telah diundang ke Istana Negara sebanyak dua kali, yakni pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.
3. Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Kalibiru mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya). Saat berkunjung di Kalibiru, Siti Nurbaya menyatakan bersyukur dan bangga karena rasa kecintaan masyarakat terhadap hutan, dan bahkan minta agar kebijakan pengelolaan hutan ditinjau kembali agar hutan jangan rusak (Akhmad, 2016).
4. Hasil kerja kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri pernah disebut Presiden Jokowi pada *CEO*

Forum di Australia 17 Maret 2018. Jokowi mengemukakan bahwa di Kaliburu orang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan *selfie* yang sempurna (Nuswantoro, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, W. (2017). Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Inisiatif dan Orientasi Pembelajaran Serta Penyesuaian Kemampuan. *EKOBIS* Vol.18, No.1, Januari 2017 : , 96-105
- BKPH Yogyakarta. (n.d.). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Yogyakarta: Balai Pengelolaan Hutan Yogyakarta
- BPS Kabupaten Kulon Progo. (2019). Kecamatan Kokap Dalam Angka. Kulon Progo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
- Bupati Kulon Progo. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Yogyakarta: Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 Nomor 2
- Creswell.J.W. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. California : Sage Publication, Inc.
- Fikri, D. A. (2017, 11 15). Menyusuri Bedah Menoreh, Akses Baru ke Borobudur dan 40 Destinasi Wisata Lain. Retrieved 11 12, 2020, from Oketravel: <https://travel.okezone.com/read/2017/11/15/406/1814684/menyusuri-bedah-menoreh-akses-baru-ke-borobudur-dan-40-destinasi-wisata-lain>
- Gunawan. (2014). Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BSBBR) Dalam Relokasi Permukiman Korban Bencana Alam di Desa Cibeber Banten. *Sosio Konsepsia* Vol 4 No 1 September-Desember , 274-284
- Gunawan dan Winarno, E. (2019). *Penyiapan Masyarakat Menghadapi Era Aerotropolis*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Ibrahim A.H; Ibrahim M.M.A. (2019). The Role of Community Self-Initiatives and Development. *Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 5, No. 4, 2019, , 432-440
- Lynam, T., W. De Jong, D. Sheil, T. Kusumanto, and K. Evans. (2007). A review of Tools for Incorporating Community Knowledge, Preferences, and Values into Decision Making in Natural Resources Management. *Ecology and Society* 12(1): 5. [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art5/>
- Menteri Kehutanan. (2007). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.437/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. . Jakarta
- Neeta Rath and Rashi Gupta. (2017). Environmental Impact of Tourism. *IJARIII*-ISSN(O)-2395-4396 Vol-2 Issue-3 2017 , 50-53
- Nusantara, I. (2021, 05 21). Dispar Kukonprogo Pastikan Destinasi Wisata Aman Selama Libur Lebaran. Retrieved 07 17, 2022, from Radar Jogja: <https://radarjogja.jawapos.com/kulon-progo-gunung-kidul/2021/05/10/dispar-kukonprogo-pastikan-destinasi-wisata-aman-selama-libur-lebaran>
- Rakhmat, J. (1999). *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi*. Remaja Rosda Kaya: Bandung
- Republik Indonesia. (1998). Keputusan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
- Republik Indonesia. (1998). Keputusan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta:

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 tentang Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jawa Lingkungan Wisata Alam Hutan Lindung. . Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepla Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepla Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781

Seftyono, Cahyo. (2011). Pengetahuan Ekologi Tradisional Masyarakat Orang Asli Jakun dalam Menilai Ekosistem Servis di Tasik Chini, Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 15, No. 1, 55-67

Soegijoko, S. R. (2011). Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Kota. In B. T. Soegijoko, N. A. Pratiwi, & A. K. Anwar, Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia (pp. 168-187). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, edisi 2